

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LANGKAT

Nama : **Alex Kimando Ginting**
NPM : **131801002**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Prof. Dr. Badaruddin, Msi**
Pembimbing II : **Dr. Warjio, MA**

Dalam pengelolaan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Langkat, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat merupakan lembaga atau organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Langkat, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Kantor Pelayanan Terpadu Langkat, 2015). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

Tujuan penelitian adalah Mengevaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat dan Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketersediaan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat tergolong cukup, Sumber daya manusia yang mendukung tergolong baik, Pelaksanaan masih kurang efektif, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah berhasil melaksanakan kebijakan dengan baik. Adapun ketidak sesuaian pelaksanaan dengan keinginan dari pembuat kebijakan perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Kata kunci : evaluasi, kebijakan, retribusi

ABSTRACT

REGIONAL POLICY EVALUATION LANGKAT REGENCY REGULATION NO . 3 IN 2012 ON LICENSING CERTAIN LEVY ON INTEGRATED SERVICES OFFICE LANGKAT REGENCY

Nama : Alex Kimando Ginting
NPM : 131801002
Study Program : Master of Public Administration
Advisor I : Prof. Dr. Badaruddin, Msi
Advisor II : Dr. Warjio, MA

In the management of the levy licensing certain Langkat, Integrated Services Office Langkat an institution or government organization which is authorized to issue a permit to any person or entity for the purpose of guidance, regulation, control and supervision of the activities, the use of space and the use of natural resources , goods facilities or certain facilities in order to protect the public interest and preserving the environment in Langkat, so that the implementation of these activities must be in accordance with District Regulation langkat namely Regional Regulation No. Langkat 3 Year 2012 on Licensing Certain Levy (Langkat Integrated Services Office, 2015).

Based on this background, the authors are interested in conducting research on Policy Evaluation Regional Regulation No. Langkat 3 Year 2012 on Licensing Certain levies on Integrated Services Office Langkat. The research objective was to Evaluate Policy Langkat District Regulation No. 3 Year 2012 on Licensing Certain levies on Integrated Services Office Langkat and Knowing what factors are inhibiting the implementation of the Regional Regulation No. Langkat 3 Year 2012 on Licensing Certain levies on District Integrated Services Office.

Based on the survey results revealed that the availability of resources and raw materials needed Integrated Services Office Langkat quite enough, human resources support is quite good, Implementation still less effective, Integrated Services Office Langkat as policy implementers Regional Regulation Langkat No. , 3 Year 2012 on Licensing Certain levies have been successfully implementing good policies. The discrepancy implementation of the wishes of the policy makers need to do further analysis.

Keywords: evaluation, policy, levy